



Hibah LPMK Berkisar Rp 110 Juta

JOGJA, BERNAS – Tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp 4,3 miliar untuk keperluan dana hibah kegiatan bagi 45 lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK).

Besaran dana hibah yang diterima setiap LPMK berbeda-beda, tergantung dari program yang diajukan. Namun biasanya berkisar antara Rp 70 juta hingga Rp 110 juta.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempu dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta, Gonggong Haryono, di sela-sela pencairan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat DIY di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (3/5), mengatakan program kegiatan yang diajukan oleh LPMK disesuaikan dengan hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan tingkat kelurahan. "Kegiatan mencakup kegiatan fisik dan nonfisik sesuai kebutuhan warga di kelurahan tersebut," kata dia.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempu dan Perlindungan Anak Kota Yogyakarta sudah mencairkan hibah untuk 20 LPMK yang sudah memenuhi syarat pencairan dana.

"LPMK harus menyampaikan proposal kegiatan tahun ini dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun lalu. Jika sudah dipenuhi, maka anggaran bisa dicairkan," katanya.

Dinas tidak akan memberikan batas waktu bagi 25 LPMK lain untuk melengkapi syarat pencairan, namun menganjurkan agar kelengkapan syarat bisa dipenuhi secepatnya.

"Pencairan anggaran bisa dilakukan hingga akhir tahun. Tetapi jika hal itu dilakukan, maka wilayah tidak memiliki kesempatan untuk menjalankan program. Oleh karena itu, lebih cepat akan lebih baik," katanya.

Setiap tahun, dana hibah yang disiapkan selalu teresap 100 persen tidak pernah sisa. Selain hibah untuk LPMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempu dan Perlindungan Anak juga memberikan dana stimulan kepada RW, masing-masing Rp 10 juta. Dana stimulan diberikan setiap tahun untuk kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana di wilayah.

"Kami juga memberikan dana untuk keperluan administrasi di RW dan RT, masing-masing Rp 1,5 juta untuk RW dan Rp 1,2 juta. Dana itu bisa digunakan untuk pembelian alat tulis," katanya.

Menurut dia, LPMK harus bisa menjalankan fungsinya memberikan fasilitasi, ke warga agar bisa berkontribusi secara maksimal kepada upaya pembangunan Kota Yogyakarta.

Ini sejalan dengan tema Bulan Bakti Gotong Royong ke-14 tingkat DIY yaitu mendorong lembaga kemasyarakatan untuk menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan tertulis dibacakan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Rani Samsinarti, mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari pemberdayaan keluarga.

Sedangkan Pj Walikota Yogyakarta, Sulisty, mengatakan, BBGRM merupakan momentum untuk meningkatkan arti penting gotong royong, terutama pada generasi muda.

"Kita perlu menanamkan semangat gotong royong kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita, sebab merekalah pemuka masa depan bangsa ini," ujarnya dalam sambutan tertulis dibacakan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri. (ant/)

www.cetak.harlanbernas.com/30140

Sifat	Tindakan
☐ Amat Segera	☐ Untuk Dit
☐ Segera	☒ Untuk Di
☒ Biasa	☐ Jumpa P

Yogyakarta,
Plt. Kepala
Sekretaris

PENCANANGAN BULAN BAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT KE XIV TINGKAT DIY TAHUN 2017

**" DENGAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
AYA GUNAKAN PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KEKURAHAN
BAGI MITRA PEMERINTAH DESA/KEKURAHAN "**



PENCANANGAN BBGRM -- Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat DIY dilaksanakan Rabu (3/5) kemarin di Balai Kota Yogyakarta. Pada acara ini diserahkan bantuan dana hibah untuk LPMK.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PMPPA	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005